

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Judul Perancangan

“Pusat Komunitas Difabel dan Taman Kuliner Dengan Pendekatan Desain Inklusif Pada Kawasan Pariwisata Kuliner Gondokusamn, Yogyakarta.”.

1.2 Batasan Judul

1.2.1 Pusat Komunitas Difabel dan Taman Kuliner

i) Pusat Komunitas

Pengertian Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang yang saling peduli lebih satu sama lain, dimana dalam sebuah komunitas terjadi hubungan antar pribadi yang erat dari para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values terhadap suatu hal.

ii) Penyandang *Difabel*

Menurut WHO difabel adalah suatu kondisi kehilangan atau ketidak normalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis pada tubuh (WHO, 1994).

Istilah kata **difabel** tidak muncul begitu saja, kata ini memiliki definisi berupa “ *different abled people* “ kata tersebut muncul melalui diskusi dan pemikiran yang panjang dari beberapa tokoh aktivis gerakan difabel. Di Yogyakarta kata tersebut awal kemunculannya berdasarkan pemikiran yang didiskusikan oleh Fakhri Mansour bersama Setia Adi Purwanta seorang aktivis gerakan difabel dari Yogyakarta tahun 1997.

iii) Taman Kuliner

Taman merupakan ruang terbuka yang dikembangkan dan dikelola pemerintah, sebagai bagian dari zona sistem ruang terbuka kota, yang dibuat untuk melayani kepentingan seluruh kota. Ukuran luas taman ini seringkali lebih besar daripada taman-taman yang terdapat di lingkungan perumahan (Carr, dkk 1992).

Taman dalam perancangan ini hanya mencakup taman lingkungan yang tidak mencakup kepentingan yang terlalu luas dan besar berada di sekitar Jl. Jenderal Sudirman.

Kuliner adalah masakan atau makanan. Istilah kuliner sering digunakan oleh masyarakat dalam menunjukkan makanan atau masakan suatu daerah. Indonesia memiliki beragam jenis masakan dan makanan di setiap daerah. Keberagaman ini membuat masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mencari tempat-tempat atau pusat jajanan yang menawarkan masakan atau makanan, mulai dari jajan di warung makan (Pedagang Kaki Lima), rumah makan, maupun restoran (Pratiwi, 2014).

Taman Kuliner ini nantinya akan mewadahi aktifitas rekreasi dan komersial yang berisi makanan tradisional Yogyakarta yang dijual berdasarkan jenis makanan (berat atau ringan), dibuat langsung oleh anggota komunitas maupun dari masyarakat sekitar.

1.2.2 Desain Inklusif

Istilah Inklusif atau Inklusi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan terbuka, yang merupakan lawan kata dari eksklusif yang artinya tertutup. Kata inklusif berasal dari kata include, yang artinya melibatkan dan turut ikut serta.

Sehingga, Konsep **Desain Inklusif** adalah sebuah pendekatan desain untuk menghasilkan fasilitas dan juga produk bagi semua orang

(sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Dengan pendekatan desain tersebut, suatu fasilitas maupun desain akan mengalami 'kompromi' sehingga semua orang sebagai pengguna dapat diakomodasi kebutuhannya dalam beraktivitas, tanpa mengeksklusifkan sebagian orang (Yusita, 2008)

Desain inklusif pada dasarnya adalah pendekatan dalam melihat suatu desain atau ruang sebagai sistem yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang difabel tanpa harus memisahkan mereka dengan orang yang tidak berketerbatasan.

Sehingga pada dasarnya “Community Center Difabel dan Taman Kuliner Dengan Pendekatan Desain Inklusif” adalah melakukan pemaksaan terhadap perancangan desain ruang yang memudahkan pengguna baik difabel maupun non-difabel dalam beraktifitas bersama tanpa adanya stigma dan batasan bagi pengguna.

1.3 Latar Belakang Persoalan Perancangan

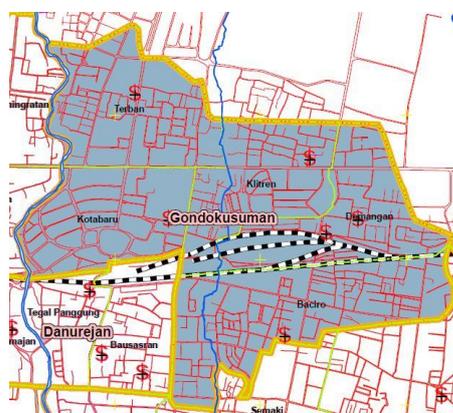
Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dibutuhkan partisipasi dari berbagai stakeholder seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat sendiri sebagai pelaku dan penerima dampak dari perkembangan yang terjadi. Penyandang difabel sebagai bagian dari masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, juga memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan melalui peran mereka dibidang ekonomi, sosial dan bidang kemasyarakatan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Peresmian Pusat Pelatihan dan Magang Kerja Bagi Disabilitas di Pusat Rehabilitasi Yakkum Sleman, Yogyakarta, mengatakan berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, pada 2015, dari 275 perusahaan yang dipantau, baru 24 perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas

sejumlah 123 orang. Menurut dia, angka tersebut masih jauh dari harapan mengingat jumlah penyandang disabilitas di DIY sendiri lebih dari 26.000. Lebih lanjut ia mengatakan, dari data jumlah penyandang disabilitas itu, sebanyak 25.050 termasuk penyandang disabilitas kategori miskin. Kata Sultan juga dalam acara tersebut, disabilitas tanpa kemampuan akan menimbulkan masalah seperti penambahan jumlah kemiskinan, terutama pad a peran laki-laki sebagai punggung keluarga (Sarawati, 2016).

Dalam bidang ekonomi atau dunia usaha bagi penyandang difabel dimana usaha atau pekerjaan menjadi sumber pendapatan bagi mereka, memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, ada beberapa penyandang difabel yang memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, mobilitas, pendidikan, kemampuan maupun persaingan usaha yang terjadi di masyarakat namun tidak diberikan kesempatan untuk menngkatkan kualitas hidup secara bersama-sama.

1.3.1 Luas Wilayah dan Pertumbuhan Penduduk Gondokusuman, Sleman, Yogyakarta



Gambar 1-1 Peta Lokasi Kawasan Gondokusuman
(Wikipedia)

Kecamatan Gondokusuman memiliki luas kawasan sebesar 398,7 ha dan terletak di perbatasan pusat kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Wikipedia).

Jumlah penduduk Kecamatan Gondokusuman, Sleman Yogyakarta terhitung tahun 2017 adalah 41.509 orang. Berikut rincian jumlah penduduk di Kecamatan Gondokusuman berdasarkan masing-masing kelurahan.

Table 1-1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Gondokusuman Berdasarkan Masing-Masing kelurahan

Desa /Kelurahan	Penduduk		
	L	P	L+P
DEMANGAN	4.194	4.406	8.600
KOTABARU	1.340	1.338	2.678
KLITREN	4.563	4.809	9.372
BACIRO	5.832	6.381	12.213
TERBAN	4.393	4.739	9.132
Jumlah	20.322	21.673	41.995

(Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2017)

1.3.2 Pemberdayaan Penyandang Difabel di Perkotaan

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang difabel, yang dimana lebih dari 1 miliar merupakan penyandang difabel. Mereka terbelong kelompok minoritas terbesar di dunia, sekitar 82 persen dari penyandang difabel berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan sering kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan untuk pekerjaan yang layak. Penyandang difabel tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB (Produk Domestik Bruto) atau secara lebih luas, dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kualitas kehidupan. Kemiskinan mereka terkait dengan sangat terbatasnya peluang mereka atas pendidikan dan pengembangan keterampilan. Hampir sebanyak

785 juta perempuan dan laki-laki dengan disabilitas berada pada usia produktif untuk bekerja, namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang non-difabel di perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali. Para penyandang disabilitas kerap kali terkucilkan dari akses pendidikan, pelatihan pengembangan individu dan peluang kerja (International Labour Organization, 2006).

Berdasarkan data Pusdatin Kemensos sampai dengan tahun 2010 jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai 11.580.117 orang. Menurut Kemnakertrans RI, pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas usia kerja di Indonesia sejumlah 6.008.640 (Disnakertrans, 2016)

Bentuk diskriminasi terhadap penyandang difabel dalam bidang lapangan pekerjaan juga terlihat melalui jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang difabel masih sangat sedikit, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang pada umumnya dan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dibutuhkan biaya yang besar karena harus menyediakan berbagai sarana dan alat bantu bagi kemudahan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas. Bentuk diskriminasi yang lain di bidang lapangan pekerjaan yaitu masih banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani (Disnakertrans, 2016).

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi

Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa

"Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama".

Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa :

"Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Pekerjaan yang produktif dan layak memungkinkan para penyandang difabel mewujudkan aspirasi mereka, meningkatkan kondisi kualitas kehidupan mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat. (International Labour Organization, 2006).

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, pemecahan arsitektur dapat berperan sebagai penunjang tercapainya kesetaraan

antara mobilitas aktivitas penyandang difabel dan masyarakat umum melalui mengembangkan karakteristik pola aktivitas dan interaksi sosial penyandang difabel terhadap lingkungan luar dengan masyarakat non-difabel.

1.3.3 Kelompok Sosial Eksklusif Penyandang Difabel

Menurut penelitian yang dilakukan penulis dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI), 2017. Kecenderungan cara berkomunikasi yang diambil dari teori Modal Sosial (*Social Capital*), penyandang difabel dalam berinteraksi lebih memilih untuk menjalin kepercayaan terhadap sesama penyandang difabel dibandingkan menjalin jaringan baru di luar dengan berkomunikasi pada masyarakat non-difabel.

Sehingga terbentuklah kelompok sosial yang bersifat eksklusif, yaitu hanya nyaman berinteraksi dengan sesama penyandang difabel, sehingga dibutuhkan paksaan untuk mengubah sifat eksklusif menjadi inklusif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

1.3.4 Kota Yogyakarta Belum Menjadi Kota Inklusif

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang belum ramah terhadap penyandang difabel, karena belum ada satu pun indikator kota inklusi yang terpenuhi. Hal ini mengakibatkan penyandang difabel di Yogyakarta belum terakomodasi sesuai standar dan kemudahan aksesibilitas. Indikator kota inklusi yang dimaksud meliputi, akses bangunan dan infrastruktur, dukungan masyarakat, keterjangkauan penyediaan sarana publik, kualitas layanan, dan partisipasi penyandang disabilitas. Disebutkannya, berdasarkan data Dinas Sosial DIY terdapat 334 anak penyandang difabel di Jogja, dan untuk sementara jumlah seluruh penyandang disabilitas di Jogja sebanyak 2.344 orang (Amr, 2015).

Menurut data BPS 2017 , populasi penyandang difabel berdasarkan kecacatannya terdapat 29.530 penyandang difabel di DIY, yakni 8.811 difabel fisik, dan 4.421 penyandang difabel sensorik dan 16.296 penyandang difabel lainnya (BPS Propinsi DI Yogyakarta, 2017).

Table 1-2 Jumlah Populasi Penyandang Difabel di Yogyakarta

NO	Kategori	PMKS			JUMLAH	
		Kategori Usia	Jenis Disabilitas	Jumlah Detail	JUMLAH	Total
1	Mental	ADK	Psikotik	27	1.742	1.742
		PD	Psikotik	1.715		
2	Sensorik	ADK	Netra	84	2.207	4.421
		PD	Netra	2.123		
		ADK	Runguwicara	258	2.214	
		PD	Runguwicara	1.956		
3	Fisik	ADK	Eks Kronis	32	1.138	8.811
		PD	Eks Kronis	1.106		
		ADK	Tubuh kaki	427	4.826	
		PD	Tubuh kaki	4.399		
		ADK	Tubuh tangan	182	1.730	
		PD	Tubuh tangan	1.548		
		ADK	tubuh bungkuk	99	852	
		PD	tubuh bungkuk	753		
		ADK	tubuh kerdil	41	265	
		PD	tubuh kerdil	224		
4	Intelektual	ADK	Mental Retardasi	691	7.980	7.980
		PD	Mental Retardasi	7.289		
5	Ganda	ADK	Ganda	352	1.719	1.719
		PD	Ganda	1.367		
6	Tidak diketahui jenis kecacatannya	ADK	NA	790	4.857	4.857
		PD	NA	4.067		

(Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2017)

Berikut ini jumlah penyandang difabel secara keseluruhan di Kecamatan Gondokusuman menurut data BPS Kota Yogyakarta Tahun 2017 berdasarkan jenis kecacatannya

Table 1-3 Jumlah Penyandang Difabel di Gondokusuman Berdasarkan jneis Kecacatannya

No	Kabupaten Kota	ADK	PD	JUMLAH
1	Kulon Progo	505	5270	5.775
2	Bantul	625	5900	6.525
3	Gunung Kidul	1010	7584	8.594
4	Sleman	628	6041	6.669
5	Yogyakarta	215	1752	1.967
	Jumlah	2983	26547	29.530

(BPS Propinsi DI Yogyakarta, 2017)

Dalam tulisan artikel Kantor UNESCO di Jakarta, pada 2 April 2013 UNESCO dan Pemerintah Kota Yogyakarta menandatangani kesepakatan kemitraan untuk kolaborasi di masa depan dalam kegiatan meningkatkan kesadaran hidup berdampingan dengan penyandang difabel, sehingga dibutuhkan kota yang inklusif (UNESCO Office in Jakarta, 2013).

Pada Raperda penyandang difabel di Yogyakarta yang masih dalam proses pembahasan dan pada tahun 2016 masuk sebagai salah satu agenda dari 24 program legislasi daerah (prolegda) yang menjadi skala prioritas dalam menjadikan Kota Inklusif. Empat kecamatan juga telah dibentuk memiliki paguyuban anak difabel, yakni Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, dan Gondokusuman. “Kecamatan lainnya akan menyusul pada tahun depan,” ucapnya (Amr, 2015).

Melihat jumlah data di atas dan latar belakang pencetusan Kota Inklusif di Yogyakarta, populasi penyandang difabel di DIY cukup besar. Namun, tidak banyak dari mereka dapat dijumpai hadir di ruang-ruang publik terbuka ataupun bangunan publik untuk bekerja ataupun sekedar berekreasi. Ketidakhadiran tersebut, bukan berarti mereka tidak mau bersosialisasi, melainkan aksesibilitas ruang publik yang buruk. Buruknya layanan publik, pada akhirnya membuat kebanyakan difabel memilih diam di rumah daripada menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan atau ruang-ruang publik sebagai media dalam bekerja dan berekreasi.

1.3.5 Pendekatan Desain Inklusif

Berdasarkan penjabaran di atas, kota Yogyakarta yang tidak inklusif terhadap penyandang difabel dan hadirnya kelompok sosial difabel yang eksklusif saat berinteraksi sosial dengan masyarakat non-difabel, memaksa perancangan bangunan publik yang mewadahi aktivitas penyandang difabel

dengan masyarakat non-difabel dapat digunakan secara universal dan bersifat inklusif.

Tujuan dari perancangan ini adalah mengembangkan desain terhadap karakteristik kelompok sosial yang terbentuk dari penyandang difabel terhadap masyarakat non-difabel dengan pendekatan desain inklusif terhadap pola aktivitas penyandang difabel. Resiko yang akan terjadi apabila perencanaan fasilitas ini tidak terpenuhi diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi penyandang difabel tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan fasilitas bangunan publik yang telah didesain secara inklusif agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan dan berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas yang positif.

Berdasarkan penelitian Yusita (2007, dalam (Azhari, 2016)) Desain Inklusif adalah sebuah pendekatan desain untuk menghasilkan fasilitas dan juga produk bagi semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Dengan pendekatan desain tersebut, suatu fasilitas maupun produk akan mengalami 'kompromi' sehingga semua orang sebagai pengguna dapat diakomodasi kebutuhannya dalam beraktivitas, tanpa mengeksklusifkan sebagian orang.

Dengan menerapkan Desain Inklusif dapat menghasilkan fasilitas bagi semua kalangan pengguna. Dalam arsitektur fasilitas yang dapat digunakan bagi semua pengguna adalah fasilitas *furniture*, *fixture*, dan desain sirkulasi untuk kenyamanan bagi pengguna. Keterkaitan dengan perancangan adalah desain yang dapat menghasilkan fasilitas sosial dan fasilitas rekreasi dalam satu lokasi. Fasilitas sosial disini yang dimaksud adalah *Community Center* sebagai wadah aktivitas penyandang difabel dan untuk tempat rekreasi, sebagai wadah

interaksi social antara penyandang difabel dengan masyarakat non-difabel.

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1 Permasalahan Umum

Perlunya dibangun pusat pemberdayaan penyandang difabel, yaitu *Community Center* sebagai bangunan publik yang terintegrasi dengan fungsi ruang terbuka publik sebagai sarana fasilitas dengan pendekatan desain inklusif. *Community Center* ini selain sebagai tempat pemberdayaan penyandang difabel, juga akan menjadi tempat yang universal di mana mereka dapat berkumpul dan bekerja sama antara segala usia dan segala lapisan masyarakat baik yang berketerbatasan atau yang tidak.

1.4.2 Permasalahan Khusus

Bagaimana merancang bangunan *Community Center* penyandang difabel ini agar bersifat universal bagi semua pengguna, baik yang terbatas kemampuannya atau tidak, melalui totalitas pada pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dengan cara menerapkan desain inklusif pada aksesibilitas dan mobilitas yang berkaitan dengan tata letak yang digunakan pada bangunan dan ruang terbuka publik berdasarkan standar user penyandang difabel yang merupakan kelompok social eksklusif yang dapat berinteraksi dengan masyarakat non-difabel.

1.5 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan *Community Center* dan Taman Kuliner Penyandang Difabel di Kawasan Gondokusuman , Yogyakarta adalah:

1. Bangunan Pemberdayaan Penyandang difabel yang dimaksud pada perancangan ini adalah bangunan yang menyediakan sarana dan fasilitas

sebagai media peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyandang difabel.

2. Aspek pertimbangan akses dan sirkulasi yang didasari oleh Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 30/PRT/M/2006, dengan standar kriteria baku dengan pendekatan desain inklusif untuk mempermudah penyandang difabel menggunakan bangunan dan ruang terbuka publik serta berinteraksi dengan masyarakat non-difabel.

1.6 Tujuan Sasaran Perancangan

1.6.1 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan adalah:

1. Merancang bangunan yang terintegrasi pada *landscape* ruang terbuka public dengan penekanan aspek akses dan sirkulasi ramah bagi penyandang difabel serta pendekatan desain inklusif.
2. Merancang tata letak fungsi ruang pada bangunan dan pola ruang terbuka publik yang sesuai untuk aktifitas penyandang difabel sebagai sarana dan prasarana media untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat non-difabel.

1.6.2 Sasaran Perancangan

Menghasilkan rancangan pada Pusat Komunitas yang dapat menjadi wadah untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjadi ruang interaksi social bagi penyandang difabel dengan masyarakat non-difabel dengan mempertimbangkan desain inklusif yang didasarkan pada kriteria Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 30/PRT/M/2006.

1.7 Metode Perancangan

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan adalah data fisik tapak, aktivitas sekitar tapak dan pola aktivitas interaksi komunitas dengan masyarakat (non-difabel)

Data primer dikumpulkan melalui:

- a. Survey Lapangan (Observasi) Data yang didapatkan yaitu kondisi kawasan sekitar tapak, aktivitas sekitar tapak, batasan site dengan lingkungan sekitar, transportasi, sirkulasi. Survey lapangan (observasi) juga dilakukan untuk mendapatkan pola aktivitas komunitas penyandang difabel dan pola aktivitas interaksi komunitas penyandang difabel dengan masyarakat (non-difabel).
- b. Wawancara Data yang didapatkan dari wawancara yaitu penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas penyandang difabel (Dria Manunggal)

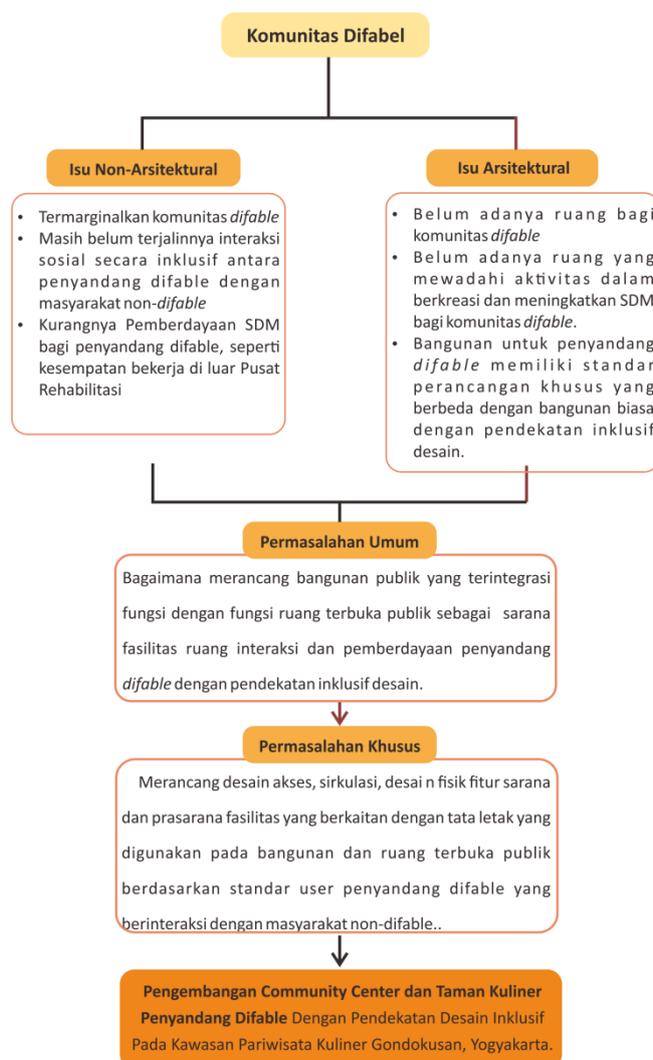
2. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan adalah profil komunitas Penyandang difabel dan susunan kepengurusannya, kajian literatur mengenai pusat komunitas, ruang interaktif, kajian tentang nperan visual untuk merancang desain bagi penyandang difabel.

1.7.2 Metode Penelusuran Masalah

Penelusuran masalah didapat dari sumber internet mengenai kawasan dan lingkungan site sekitar secara makro dan mikro, penelitian desain terdahulu, dan mewawancari Komunitas yang bersangkutan.

Metode penelusuran masalah di dapat dari studi literatur di buku, internet, dan wawancara. Setelah penelusuran dilakukan analisis terhadap kajian dan studi preseden yang di dapat. Selanjutnya akan didapatkan kriteria-kriteria dan standar yang pas dalam penerapan perancangan untuk menyelesaikan masalah seperti dari aspek sosial, ekonomi, tata massa bangunan, tata ruang dalam, tata ruang luar, dan sirkulasi.



Gambar 1-2 Skema Penelusuran Masalah

(Penulis, 2017)

1.7.3 Metode Penyelesaian Masalah

Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis pada kajian-kajian berdasarkan rumusan permasalahan perancangan. Kajian pustaka yang dianalisis meliputi:

1. Kajian tentang pusat komunitas Kajian ini membahas tentang tipologi bangunan pusat *community center*, khususnya untuk komunitas penyandang difabel. Sehingga dari kajian ini akan didapatkan pedoman untuk pemilihan ruang dan bentukan bangunan publik yang dibutuhkan.
2. Kajian tentang komunitas difabel– Dria Manunggal
Kajian ini membahas mengenai ruang pemberdayaan dan workspace sebagai wadah bagi komunitas difabel untuk meningkatkan kualitas SDM dan sekaligus sebagai wadah interaksi sosial dengan masyarakat umum.
3. Kajian tentang ruang aktivitas penyandang difabel
Kajian ini membahas mengenai ruang interaksi sosial yang berfungsi sebagai wadah bagi komunitas difabel untuk berinteraksi dengan komunitas lain serta masyarakat umum.
4. Kajian tentang Peraturan Pekerja Umum bagi penyandang difabel.
Kajian ini membahas mengenai standar desain khusus bagi penyandang difabel yang berkaitan dengan aspek aksesibilitas dan mobilitas pergerakan di dalam bangunan dan ruang terbuka publik yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam merancang ruang

1.7.4 Metode Analisis dan Sintesis

Metode analisis data dilakukan dengan:

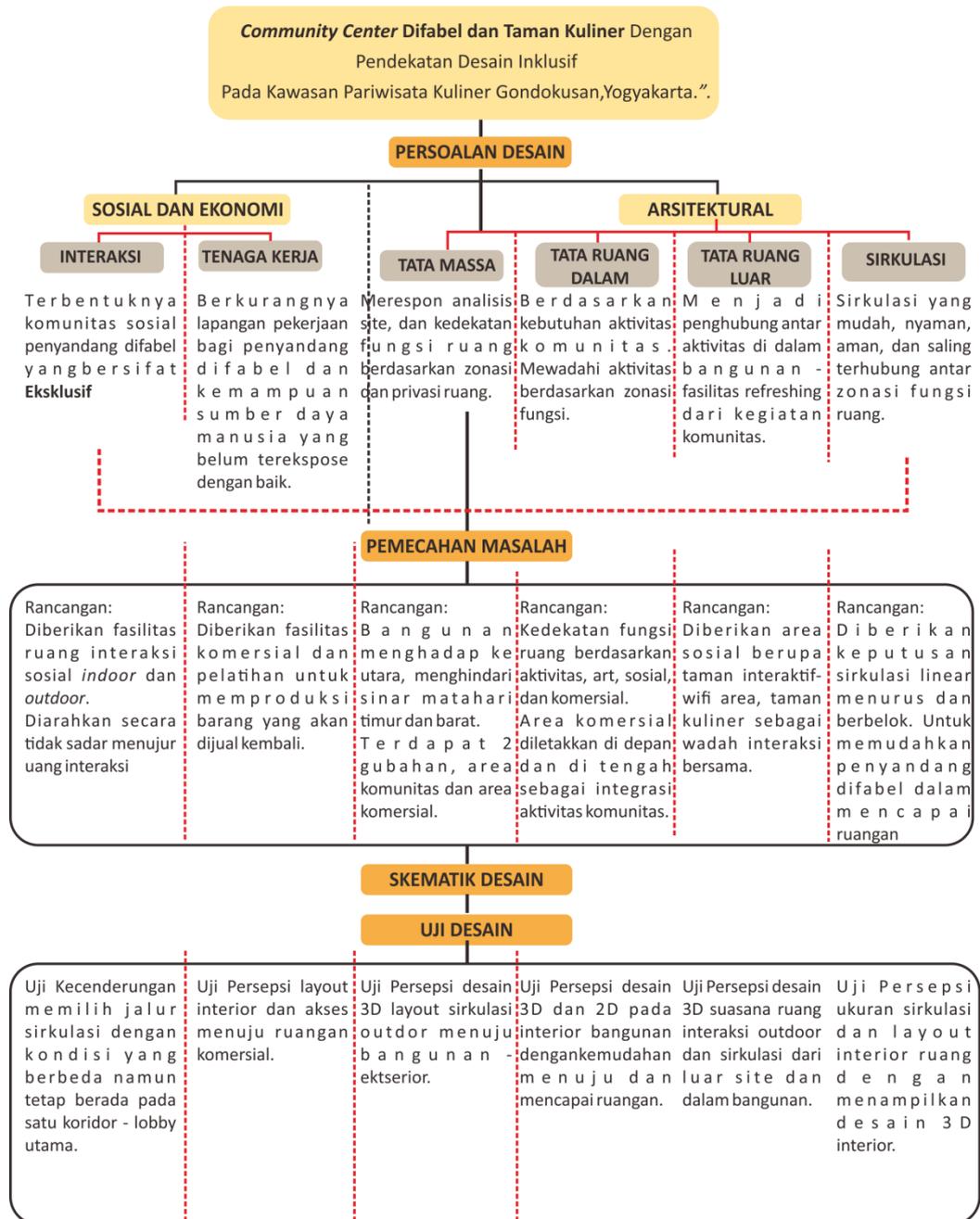
1. Menganalisis aktivitas dari Komunitas Difabel
2. Menganalisis berbagai macam kebutuhan ruang dan fasilitas untuk Pusat Komunitas Difabel di Yogyakarta yang dikaitkan dengan aktivitas komunitas difabel.

1.7.5 Metode Pendekatan Konsep Bangunan

Pendekatan konsep bangunan didasarkan pada kriteria-kriteria desain yang ada di dalam prinsip desain inklusif yang telah ditentukan. Prinsip desain inklusif ini yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan desain dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan tersebut.

1.7.6 Metode Pengujian Desain

Metode pengujian perancangan desain ini adalah tahap pembuktian keberhasilan perancangan desain. Metode yang digunakan adalah mengevaluasi kesesuaian seluruh standar teori yang dituangkan kedalam desain akhir dan di uji dengan simulasi pergerakan aksesibilitas dan mobilitas penyandang difabel pada desain objek fasilitas yang ditawarkan pada perancangan ini. Melihat kelengkapan ruang – ruang berkaitan dengan tata letak yang sesuai dengan aktifitas penggunaanya.

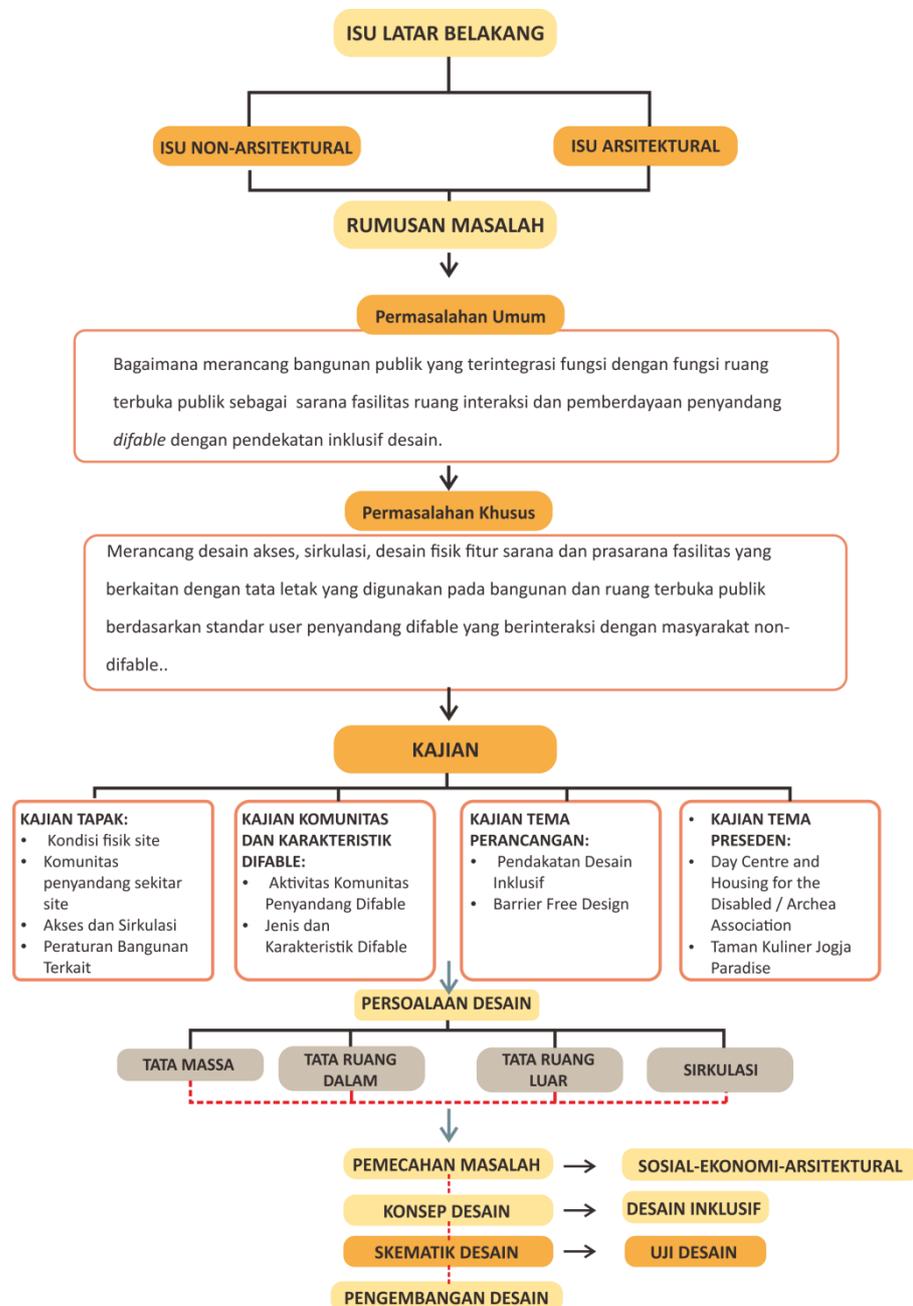


Gambar 1-3 Bagan Metode Pengujian Desain
 (Penulis,2017)

Penjelasan mengenai metode pengujian desain yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji persepsi desain dilakukan dengan mewawancarai komunitas penyandang difabel dari komunitas Dria Manunggal. Hal yang akan diujikan kepada komunitas penyandang difabel adalah terkait ruang-ruang dalam dan ruang luar, suasana interior ruangan yang mendukung aktivitas, sirkulasi dalam dan luar bangunan, area komersial, taman interaktif, dan taman kuliner. Pengujian desain dilakukan dengan cara memperlihatkan gambar 3D sebagai bentuk visualisasi rancangan. Sedangkan pengujian desain yang dilakukan terhadap komunitas Dria Manunggal adalah pengujian terkait ruang-ruang yang dapat dijadikan ruang interaksi seperti ruang luar berupa taman kuliner, taman interaktif, dan area komersial. Pengujian desain dilakukan dengan cara memperlihatkan gambar 3D sebagai bentuk visualisasi rancangan.
2. Uji Kecenderungan dalam memilih jalur sirkulasi.
Terdapat dua pilihan jalur sirkulasi yang berada di satu jalur koridor, dengan dua kondisi yang berbeda, tidak dibedakan khusus untuk difabel dan non-difabel, namun dari pemilihan sirkulasi tersebut terlihat kecenderungan tiap pengguna untuk memiliki persepsi jalur mana yang dilalui oleh siapa (difabel dan non-difabel).

1.8 Peta Pemecahan Permasalahan (Kerangka Berpikir)



Gambar 1-4 Bagan Kerangka Berpikir

(Penulis,2017)

1.9 Keaslian Penulisan

Pusat Pemberdayaan Kaum Difabel di Bantul (Redesain Yayasan Penyandang Cacat Mandiri)

Dengan Pendekatan *Ergonomic for Disabled* dan *Contrast in Context*

(Dewi, 2016)

Penelitian ini membahas permasalahan yang diangkat pada Pusat Pemberdayaan Kaum Difabel yaitu, bagaimana wujud tatanan ruang dalam dan ruang luar pada Pusat Pemberdayaan Kaum Difabel di Bantul (Redesain YPCM) sesuai persyaratan fisik dan psikis kaum difabel melalui pendekatan ergonomic for disabled dan wujud fasad yang komunikatif melalui pendekatan contrast in context. Pusat Pemberdayaan Kaum Difabel nantinya akan didesain dengan konsep berkelanjutan, yang menyediakan fasilitas dan program ruang yang mencerminkan kehidupan dan penghidupan sebagai sarana rekreasi dan edukasi bagi penghuni dan pengunjung yayasan. Kehidupan penghuni yayasan dan penghidupan bagi keberlangsungan kebutuhan hidup mereka. Sehingga akan tercipta yayasan selayaknya rumah yang selalu adalah citra sang manusia pembangunnya (Mangunwijaya, 2009:47).

Perencanaan Pusat Komunitas Tunanetra Indonesia

Dengan Pendekatan Indera

(Sekar & Rachmawati, 2016)

Penelitian ini membahas kebutuhan sebuah fasilitas yang dapat mewadahi segala kegiatan penyandang tunanetra untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dalam desain diterapkan pendekatan perancangan dari sudut pandang pengguna tunanetra berupa pentajaman pada alat indera lainnya seperti penciuman dan pendengaran. Diharapkan rancangan dapat menjawab permasalahan sosial yang terjadi tunanetra juga sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai tunanetra.

Perancangan Pusat Kuliner Sebagai Ruang Publik di Kota Kendari

(Pratiwi, 2014)

Penelitian ini membahas perkembangan kota saat ini, warung makan (PKL) menggunakan ruang-ruang jalan dan ruang kota yang rendah efektifitasnya atau ruang-ruang yang tidak dimanfaatkan pemiliknya merupakan arena yang paling mudah dijadikan tempat untuk melakukan usaha komersil. Kehadirannya dapat mengganggu kegiatan, ketertiban dan keindahan kota karena efek visual maupun dampak pada lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga keputusan yang dapat diambil dari penyelesaian isu tersebut adalah dengan melakukan perancangan pusat kuliner sebagai ruang publik di pusat kota.

Redesign Pasar Tradisional di Setan, Sleman Dengan Pendekatan *Inclusive Design*

(Azhari, 2016)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana meredesain pasar tradisional agar lebih menarik untuk didatangi dan hidup dalam aktivitas siang malam. Sehingga keputusan desain dalam meredesain pasar tradisional ini melalui pendekatan *Inclusive Design*, di mana semua kalangan masyarakat dapat menikmati pasar tradisional sebagai bangunan publik yang tertutup maupun terbuka.

**PUSAT KOMUNITAS TUNARUNGU DI YOGYAKARTA-Ruang
Pertunjukan sebagai Ruang Interaksi Tunarungu dan Masyarakat dengan
Mempertimbangkan Aspek Visual dan Getaran**
(Puspitisari, 2017)

Penelitian ini membahas tentang pusat komunitas tunarungu, di mana penyandang tunarungu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dan menikmati ruang pertunjukan dengan keterbasan pendengaran. Berfokus pada kegiatan seni Komunitas DAC. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan visual dan getaran agar penyandang komunitas tunarungu dapat menikmati pertunjukkan dan aktivitas di dalam komunitas.